

Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020

Samsir Hamajen¹, Asep Setiawan², Lusi Andriyani³

Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*Email: samsirhamajen@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi politik pemenangan pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara tahun 2020. Pasangan ini dapat mengalahkan pasangan Helmi Umar Mucksin dan Laode Arfan dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Untuk mengkaji strategi politik pemenangan ini konsep yang digunakan adalah partai politik, koalisi besar dan pemilu. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan Teknik pengambilan data melalui wawancara sejumlah tokoh partai politik dan tokoh di Halmahera Selatan serta studi literatur. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pertama, strategi pemenangan memanfaatkan gagalnya petahanan Bupati Halmahera Selatan yang tidak dapat mencalonkan diri lagi. Kedua, pasangan Usman-Bassam menggalang koalisi besar dengan merangkul sembilan partai politik yang menguasai 21 kursi di DPRD di Halmahera Selatan. Ketiga, strategi pemenangan pasangan Usman-Bassam dilakukan dengan memperkuat kampanye baik melalui jaringan kampanye ke pelosok desa sampai dengan promosi program politiknya.

Kata Kunci : *Pilkada, Halmahera Selatan, Strategi, Pemilihan, Koalisi Besar*

ABSTRACT

This study aims to examine the political strategy of winning the pair Usman Sidik and Hasan Ali Bassam Kasuba in the regional elections of South Halmahera Regency, North Maluku in 2020. This pair was able to defeat the pair Helmi Umar Mucksin and Laode Arfan in the 2020 simultaneous regional elections. used are political parties, grand coalitions and elections. A qualitative approach was used in this study with data collection techniques through interviews with a number of political party figures and figures in South Halmahera and literature studies. From this research it was found that first, the winning strategy took advantage of the failure of the incumbent Regent of South Halmahera who could not run again. Second, the Usman-Bassam pair formed a grand coalition by embracing nine political parties which controlled 21 seats in the DPRD in South Halmahera. Third, the winning strategy for the Usman-Bassam pair was carried out by strengthening the campaign both through campaign networks in remote villages and through promoting their political programs.

Keywords : *Election, South Halmahera, Strategy, Election, Grand Coalition*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 diikuti dua pasangan yakni Usman Sidik dan Ali Hasan Bassam Kasuba berkompetisi dengan pasangan Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan (Adilah dan Ghiffari:2020). Pilkada di Halmahera Selatan (Halsel) ini termasuk unik karena berlangsung di tengah Pilkada Serentak di Indonesia pada masa COVID-19. Dengan kekhawatiran akan turunnya kualitas Pilkada Serentak ini maka dikeluarkan regulasi khusus agar pesta demokrasi di daerah ini berjalan optimal namun memiliki kualitas. Hal itu dikarenakan munculnya kekhawatiran rendahnya partisipasi politik karena situasi sedang dilanda pandemi COVID-19. (Wahyudi, F., & Hanifannur, M. :2021)

Pasangan calon Usman Sidik-Hasan Ali Bassam dalam Pilkada Halmahera Selatan 2020 berhasil membangun koalisi yang solid dengan delapan partai politik yang memiliki basis massa yang beragam. (Adilah dan Ghiffari:2020). Delapan partai politik yang mendukung pasangan ini adalah Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dukungan dari delapan partai politik tersebut sangat penting dalam membantu pasangan Usman Sidik-Hasan Ali Bassam untuk meraih suara dalam Pilkada Halmahera Selatan 2020. Selain itu, dukungan dari partai politik juga memberikan keuntungan dalam hal pembiayaan dan logistik kampanye. Menurut hasil yang diumumkan KPU Halmahera Selatan, pasangan Usman-Bassam meraih 57.486 suara atau 55,83 %, sedangkan pasangan Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan meraih 45.474 suara atau 44,17 persen. Jumlah tersebut, suara sah 102.600 suara atau 66,87 persen. Sebagaimana dikutip dari media Indotimur berdasarkan Data ini sesuai form C1, seluruh TPS di Halmahera Selatan. Usman - Bassam memperoleh 55,83 persen atau 57.486 suara dan Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan 44,17 persen 45.474 suara. Jumlah Suara sah 102.960 suara atau 66,87 persen (KPUD Halmahera Selatan: 2020).

Kajian langsung mengenai Pilkada Halmahera Selatan dilakukan Solihin, E. B.,

Rettob, K., & Effendi, D. (2022). Penelitian ini menyimpulkan kekalahan Bahrain Kasuba dalam kandidasi disebabkan oleh faktor institusional, yaitu lemahnya kelembagaan partai dan faksionalisme. Sedangkan Agusmawanda, A., & Husen, M. (2021) menganalisis kekuatan petahana dalam memenangkan pilkada Halmahera Selatan tahun 2018. Dan kemudian Dogowini, R. C., Gosal, R., & Kimbal, A. (2018) melakukan analisis mengenai strategi politik Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim dalam pilkada tahun 2015. Selanjutnya adalah Husen, M., & Suleman, S. (2020) tentang Etnisitas Dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Kajian lain tentang politik di wilayah Halmahera dilakukan oleh Garedja, R. Y., Gosal, T. R. dan Lengkong, J. P. (2020) tentang Dinamika Politik Lokal di Pilkada Kabupaten Halmahera Utara. Karim, Z., Wance, M. dan Taib, J. (2017) mengkaji integritas KPUD DPRD Halmahera Selatan dalam pelaksanaan Pilkada 2015. Sebastin, AP, Rumapea, P. dan Liando, D.M. (2018). Profesionalisme KPUD Halmahera Selatan Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Administrasi Umum dan Wakil Direktur Tata Usaha Negara Tahun 2015. Secara keseluruhan, Siti Khodijah dan Valina Singka Subekti (2020) melakukan kajian kemenangan pilkada melalui koalisi besar, "Dinamika Perkembangan Aliansi Partai Calon Tunggal pada Pilgub Daerah Lebak Tahun 2018", Penelitian Esty Ekawaty (2019) Peta Koalisi Partai Politik Indonesia pada Pemilihan Presiden Era Reformasi. Penelitian Gunawan, Arry Bainus dan Caroline Paskarina (2020) berjudul Strategi Koalisi Partai Politik Lokal dan Partai Nasional pada Pasangan Calon Primer Daerah yang Menang: Studi Kasus Jaminan Kemenangan Pasangan Idham dan Chalidin pada Pilgub dan Wakil Gubernur Kabupaten Naganis Raya Tahun 2017 Pemilihan Gubernur. Penelitian Firman Noor (2018) Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Visi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2017-2018. Belum ada penelitian tentang strategi kemenangan Pilkada Halmahera Selatan tahun 2020. Penelitian ini merupakan tugas penting untuk mengisi gap Pilkada Halmahera Selatan tahun 2020. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana persaingan antara dua pasangan yang salah

satunya didukung oleh banyak partai politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemenangan pasangan Usman-Bassam pada Pilkada Provinsi Halmahera Selatan Tahun 2020.

Kerangka Teori Strategi Politik

Strategi politik adalah suatu metode atau taktik yang digunakan oleh para pemimpin politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Untuk memberikan dasar penjelasan yang lebih akademik, berikut ini adalah beberapa definisi strategi politik yang diambil dari buku ilmiah. Dalam buku "The Handbook of Political Marketing," Bruce I. Newman dan John Philip Jones mendefinisikan strategi politik sebagai "rangkaiannya tindakan dan kebijakan yang dipilih oleh para pemimpin politik untuk mencapai tujuan politik mereka, termasuk bagaimana mengelola citra, bagaimana meraih dukungan publik, serta bagaimana memenangkan pemilihan" (Newman & Jones, 1999). Dalam buku "The Strategy of Conflict" karya Thomas C. Schelling, ia menggambarkan strategi sebagai "pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pemimpin politik dalam situasi di mana mereka bersaing dengan para lawan mereka, dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka" (Schelling, 1960). Sedangkan dalam buku "Handbook of Political Science" karya Robert E. Goodin dan Hans-Dieter Klingemann, strategi politik didefinisikan sebagai "sebuah serangkaian tindakan yang dipilih oleh para pemimpin politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan hasil pemilihan, serta untuk memperoleh dukungan publik" (Goodin & Klingemann, 1993).

Selanjutnya Schoeder Peter Schröder (2013:11) dalam bukunya Strategi Politik menjelaskan pengertian dari strategi politik: "Strategi politik adalah seperangkat langkah dan tindakan yang dilakukan oleh para aktor politik untuk mencapai tujuan politik tertentu". Selanjutnya Schröder menambahkan "Strategi politik harus didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai lingkungan politik yang ada, termasuk kekuatan dan kelemahan partai politik, pandangan publik, dan kebijakan pemerintah yang ada" (Schröder:11)

Menurut Schröder terdapat dua jenis strategi politik yakni pertama, strategi ofensif

yang melibatkan serangan langsung terhadap lawan politik. Dalam strategi ini, para aktor politik berusaha untuk memperkuat posisi mereka dan meraih keuntungan dari kelemahan lawan politik. Strategi ofensif sering digunakan dalam situasi di mana para aktor politik ingin mengubah pandangan publik atau menggulingkan pemimpin politik yang ada. Schröder menyebutkan bahwa "Strategi ofensif mencakup serangan langsung terhadap lawan politik, termasuk serangan terhadap citra lawan, kebijakan politik lawan, atau kepemimpinan lawan" (Schröder : 57).

Strategi politik kedua adalah strategi defensif yang melibatkan tindakan untuk melindungi diri dari serangan lawan politik. Dalam strategi ini, para aktor politik berusaha untuk mempertahankan posisi mereka dan mencegah kelemahan mereka dieksploitasi oleh lawan politik. Strategi defensif sering digunakan dalam situasi di mana para aktor politik ingin mempertahankan dukungan publik atau menjaga status quo. Schröder menyatakan bahwa "Strategi defensif melibatkan tindakan untuk melindungi diri dari serangan lawan politik. Contoh tindakan defensif meliputi memperkuat citra publik dan menanggapi serangan lawan"

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa strategi politik merupakan suatu metode yang dipilih oleh para pemimpin politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka yang mencakup berbagai tindakan dan kebijakan, seperti membangun koalisi, meningkatkan kepercayaan publik, memobilisasi basis dukungan, meningkatkan visibilitas, dan membangun citra yang positif. Tujuan dari strategi politik ini adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan hasil pemilihan, serta untuk memperoleh dukungan publik.

Koalisi Partai Politik

Heywood mencatat bahwa koalisi politik adalah aliansi dua atau lebih partai atau faksi yang setuju untuk berbagi kekuasaan dalam pemerintahan atau oposisi, atau untuk bekerja sama dalam masalah atau serangkaian masalah tertentu. (Heywood, 2019: 434). Heywood menambahkan bahwa koalisi politik dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari aliansi formal antar partai politik hingga kemitraan yang lebih informal antara kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil, atau bahkan politisi individu. Apa kesamaan bentuk

koalisi yang berbeda ini, bagaimanapun, adalah bahwa mereka didasarkan pada kepentingan atau tujuan bersama, dan melibatkan beberapa tingkat kerja sama atau kolaborasi antara aktor yang terpisah.

Koalisi politik sering dibentuk sebagai tanggapan terhadap masalah politik atau sosial tertentu, seperti pemilihan umum atau proposal kebijakan, yang dipandang membutuhkan pengumpulan sumber daya atau koordinasi upaya di berbagai kelompok atau partai. Koalisi juga dapat dibentuk sebagai sarana untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan yang membutuhkan mayoritas atau supermajority untuk memerintah secara efektif. Keberhasilan koalisi politik tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat kepercayaan dan kerja sama antara aktor yang berpartisipasi, kompatibilitas tujuan politik atau sosial mereka, dan keseimbangan relatif kekuasaan antara berbagai kelompok atau pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, pembangunan koalisi mungkin memerlukan kompromi dan negosiasi dari pihak aktor yang berpartisipasi, karena mereka bekerja untuk menemukan kesamaan dan mengatasi perbedaan dalam ideologi atau strategi.

Menurut Arend Lijphart dalam *The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands* (1968:190-191) terdapat beberapa bentuk koalisi: (1) *Minimal Winning Coalition*: Teori ini menyatakan bahwa koalisi yang terbentuk harus mencakup jumlah partai politik yang minimal untuk memperoleh mayoritas di parlemen. (2) *Minimum Size Coalition*: Teori ini mengatakan bahwa koalisi yang terbentuk harus memiliki jumlah partai politik yang minimal, tidak hanya untuk memperoleh mayoritas di parlemen, tetapi juga untuk mengurangi konflik internal dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. (3) *Bargaining Proposition*: Teori ini mengatakan bahwa dalam pembentukan koalisi, partai politik harus mengajukan proposal dan menawarkan kontribusi untuk pemerintahan yang akan datang. (4) *Minimal Range Coalitions*: Teori ini mengatakan bahwa partai politik dalam koalisi harus memiliki persamaan dalam beberapa isu penting dan bersedia untuk menanggulangi perbedaan mereka pada isu-isu lain. Lijphart menyatakan bahwa "Persamaan di antara partai-partai koalisi harus cukup

besar agar mereka dapat menyetujui kebijakan bersama dan bertahan dalam koalisi". (5) *Minimal Connected Winning Coalitions*: Teori ini mengatakan bahwa koalisi yang terbentuk harus terdiri dari partai politik yang terhubung secara politik dan memiliki kesamaan pandangan.

Pemilu

Selain konsep di atas dalam penelitian ini juga digunakan konsep pemilu. Menurut Harris G. Warren dalam *Voting and Elections: The World's Most Critical Democratic Practice* (2013), pemilu adalah proses pengambilan keputusan formal di mana populasi memilih seseorang untuk memegang jabatan publik atau memutuskan proposal kebijakan tertentu. Pemilihan umum adalah salah satu komponen yang paling dikenal luas dan penting dari sistem demokrasi, karena mereka memberi warga negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin mereka dan untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka di kantor. (Warren, 2013: 1)

Warren mengemukakan bahwa pemilu adalah proses pengambilan keputusan formal di mana sebuah populasi memilih seorang individu untuk memegang jabatan publik atau memutuskan kebijakan tertentu. Pemilu merupakan salah satu komponen demokrasi yang paling penting, karena memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan memegang mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka di jabatan publik.

Sementara itu, menurut A. Sudiharto, pemilu merupakan alat penting demokrasi dan indikator nyata partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan pandangan ini dapat dikemukakan bahwa pemilu adalah suatu cara pengangkatan wakil-wakil yang memimpin roda pemerintahan, dimana penyelenggaraan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak tunduk pada pengaruh atau tekanan dari negara manapun. Semakin besar kebebasan dalam menentukan pilihan, semakin baik pilihan yang dibuat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan, semakin buruk penyelenggaraan pemilu. Hal ini memunculkan kesadaran bahwa semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam pemilu (Budiardjo, 2008:461) atau pilihan langsung.

Namun dalam sistem demokrasi Indonesia, cara penyaluran pendapat rakyat

yang berdaulat adalah secara langsung dan sebagian tidak langsung atau secara umum disebut juga sistem demokrasi perwakilan. Pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu: a) pemilihan parlemen; b) referendum (referendum); (c) inisiatif; d) referendum; e) ingat (ucapan); f) pemogokan; g) demonstrasi. Dalam suasana terbuka di mana kebebasan berekspresi dan berserikat terjaga, hasil pemilu dinilai cukup akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008). Setiap sistem pemilihan parlemen, biasanya diatur dengan undang-undang dan peraturan, setidaknya mencakup tiga variabel utama, yaitu pemungutan suara (voting), daerah pemilihan (dapil), dan formula pemilu (Surbakti, 2007). Pemilihan langsung dengan menggunakan prinsip pemilihan langsung, terbuka, bebas, rahasia, adil dan adil dapat disebut sebagai sistem rekrutmen PNS dengan parameter semi demokrasi. Oleh karena itu, sangat tepat untuk mengumumkan pemilihan kepala daerah (pemilukada). Dalam buku teks ilmu politik, rekrutmen politik disebut demokratis jika: 1). Menggunakan mekanisme seleksi reguler 2). Memungkinkan rotasi yang kuat 3). Mekanisme tersebut dilaksanakan secara terbuka 4). Tanggung jawab publik (kas j. Prihatmoko, 2005).

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang diteliti, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode kualitatif adalah metode observasi ilmiah untuk mengumpulkan data non-numerik (Creswell, 2015). Adapun lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. fokus penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 secara langsung yang diikuti dua pasangan calon yang diusung partai politik.

Teknik pengumpulan data ini meliputi wawancara dan studi pustaka. Wawancara akan dilakukan kepada dua pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

masing masing paslon nomor urut 1 Helmi Umar Mucksin-Laode Arfan dan Pasangan Nomor urut 2 Usman Sidik-Hasan Ali Basam Kasuba pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ini strategi yang dimaksud adalah penguatan sembilan parpol dalam menggalang dukungan. Selain itu juga koalisi besar melakukan strategi ofensif dalam menguasai wacana kampanye politik. Strategi ofensif dari koalisi parpol juga dilakukan di daerah lain seperti di Nagas Raya tahun 2017 (Gunawan:2020). Dalam analisis terhadap strategi politik pasangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba dapat dibagi dalam tiga bagian yakni pertama, strategi untuk mencegah petahana mencalonkan diri. Kedua, strategi dalam menggalang koalisi besar. Ketiga, strategi kampanye yang memperkuat citra kandidat dan melemahkan kandidat lain.

Strategi Mencegah Petahana Calonkan Diri.

Strategi kemenangan pasangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba telah dimulai dengan upaya untuk mencegah petahana yakni Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba. Bupati petahana ini memiliki rencana untuk mengikuti Pilkada 2020 sekaligus memperpanjang masa jabatannya dua kali. Pada periode pertama sebagai bupati, Bahrain Kasuba berpasangan dengan Iswan Hasjim. Untuk mencalonkan Diri, Wakilnya Iswan Hasjim melenggang ke bakal Calon walikota Ternate, saatnya Iswan Hasjim tidak memperoleh dukungan Partai. Petahana Bahrain Kasuba sendiri mengambil pasangannya Lutfi Mahmud dari kalangan pengusaha, hanya saja Lutfi lebih dulu tutup Usia, Petahana Bahrain kembali mengambil pasangannya Muhlis Sangaji yang merupakan Pensiunan ASN pada jabatan asisten II setda Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Caleg saat ini yang tidak mencalonkan diri pada Pilkada Halmahera Selatan 2020 karena tidak mencapai jumlah dukungan partai politik yang diperlukan untuk mendaftar ke KPUD Halmahera Selatan. Besaran subsidi yang harus diisi ditentukan dengan syarat minimal enam kursi di DPRD Halmahera

Selatan. Sementara jumlah kursi yang diperoleh dengan dukungan pasangan calon yang sudah mapan hanya 3 per partai Gerindra. Tiga kursi tambahan yang dibicarakan pasangan calon itu justru di menit-menit terakhir tertukar dengan pasangan calon lainnya. Tiga kursi dari Partai Berkarya 1 dan PKPI 2 kursi (Hairil Hiar: 2020).

Strategi Menggalang Koalisi besar

Penggalangan untuk membangun koalisi besar ini dimulai dengan berbagai langkah dan pendekatan terhadap para pemimpin partai politik di pusat dan daerah. Untuk membangun koalisi sembilan partai ini Usman-Bassam melakukan pendekatan sebelum Pilkada berlangsung. Setelah pendekatan itulah maka deklarasi dilakukan untuk menguatkan dukungan dalam Pilkada Halmahera Selatan 2020. Setelah memperoleh dukungan dari 9 (Sembilan) partai politik, pasangan calon Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba melakukan deklarasi sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Halmahera Selatan periode 2020-2024 yang dihadiri langsung pengurus dan kader 9 (Sembilan) partai politik dan masyarakat di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan pada 3 September 2020. Dalam deklarasi tersebut, calon Bupati Usman Sidik sudah menyampaikan berbagai program prioritas di hadapan ribuan masyarakat Halmahera Selatan jika dirinya terpilih sebagai Bupati nanti, bahkan hal yang sama juga disampaikan para juru kampanye dari partai politik.

Bakal calon Bupati Usman Sidik dalam orasi politiknya menyampaikan, untuk mendorong pembangunan di daerah. Halsel harus memiliki Bupati yang punya kemampuan komunikasi dan jaringan nasional yang kuat agar bisa meyakinkan pemerintah pusat terkait apa yang dibutuhkan untuk pembangunan Halsel. "Halsel ini sudah saatnya mempunyai pemimpin yang punya jaringan yang kuat di pusat. Kalau kita punya itu, maka kita bisa yakinkan pemerintah pusat apa yang ingin kita bangun di Halsel, pasti akan disrelekasikan," kata Cabup di depan ribuan pendukungnya (posmalut.com, 2020)

Selain calon Bupati waktu itu, calon Wakil Bupati Bassam Kasuba berjanji akan mengembalikan senyum masyarakat Halsel. Sebab, kata Bassam, senyum itu telah hilang selama empat tahun terakhir karena pelayanan

pemerintah kepada masyarakat sangat tidak maksimal. Bassam menyatakan, apabila dirinya dan Usman- terpilih nanti, akan kembalikan senyum masyarakat Halsel yang hilang. "Ini karena pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan, dan pendidikan sangat tidak maksimal. Maka bersama Usman Bassam kita kembalikan senyum Halsel," katanya merujuk pandangan lemahna layanan Bupati Petahana.

Koalisi besar yang disebut sebagai tim unggul ini merupakan gabungan sembilan partai politik. Dengan bekal sembilan parpol inilah maka strategi ofensif dikerahkan karena kekuatan politik menjangkau sampai ke pelosok desa di Halmahera Selatan. Oleh sebab itulah tim koalisi besar ini memperkuat diri dengan sebuah tim yang solid multi partai. Tentu tidak mudah menggabungkan sedemikian banyak parpol dalam satu tim namun inilah salah satu ramuan penting untuk melakukan kampanye di lapangan. Kalau dilihat komposisi partai pendukung sebagian adalah partai yang memiliki kursi di DPR seperti Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan partai lainnya seperti Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, Partai Keadilan Persatuan Indonesia tidak memiliki kursi di DPR.

Dengan sembilan parpol inilah seperti tampak dalam komposisi di DPRD Kabupaten Halmahera sebenarnya bisa lebih dari dua pasangan. Namun dengan kurangnya paslon potensial sembilan parpol mencari jalan aman. Pengertian DPRD terpilih dalam pemilihan parlemen tahun 2019-2024 didasarkan pada keputusan KPU Halsel nomor: 20/PL.01.9-Kpt/8204/KPU-Kab/VIII/2019, kepada menetapkan anggota DPRD di lima kabupaten. Strategi kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba diawali dengan pembentukan tim kampanye gabungan partai koalisi yang dilanjutkan dengan pembentukan tim 60 di tingkat kecamatan oleh partai koalisi, selanjutnya pembentukan tim di tingkat desa sebanyak 3.400 orang yang tersebar di 249 desa. Komitmen sembilan parpol ini didengarkan sejak awal bahkan sebelum jumlah pendukung parpol ini genap sembilan. Ini menunjukkan bahwa koalisi pendukung

Usman-Bassam ini sejak awal landasannya kuat. Dari berbagai laporan sejak awal koalisi ini memang kuat seperti dilihat dalam deklarasi bulan Juli 2020 sudah tampak kekuatan koalisi besar ini. Partai koalisi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik -Bassam Kasuba, secara tegas menegaskan tidak ada lagi polemik di masing-masing partai politik, untuk merubah dukungan ke calon lain (cerminmalut.com, 2020)

Pada Agustus 2020, dari delapan partai (Parpol) pendukung Usman-Bassam, hanya ketua dan pimpinan partai Berkarya yang tidak bisa hadir karena sementara berhalangan rapat kerja nasional (Rakerna) yang diselenggarakan di luar daerah. Diberitakan media, Muhammad Qudri, anggota Partai Demokrat, mengatakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) masih mengikuti Keputusan (SK) SK DPP 16/DPP/SK/IV/2020 yang telah nama Anda di atasnya. Usman-Bassam sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur (Halmahera Selatan) Halmahera Selatan 2020. "Partai Demokrat adalah partai besar, tidak benar ada informasi perubahan dukungan calon lain. Sebab, selama ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum sudah mendapat instruksi dari pemohon lain terkait perubahan hibah. Kami di DPC Halmahera Selatan tetap berkomitmen dan konsisten dalam mentaati peraturan," ujar Qudri, diposting pada 16 Agustus 2020 di mirrormalut.com. Sementara itu, Direktur Halmahera Selatan DPD PSI Adnan Wahid menyampaikan bahwa DPD PSI Halmahera Selatan menyatakan sikap mendukung Usman-Bassam dan prosesnya dimulai di tingkat bawah mulai November 2019 dan rekomendasinya diterbitkan pada 03/02/2020 dengan B.1 KWK. "Kekuatan SK ini dialihkan secara terstruktur, tidak akan pernah berubah karena konsep PSI adalah menggantikan Bupati Halmahera Selatan yang baru. Kami di DPC terus bekerja sama dengan DPP dan sampai saat ini tidak ada perubahan, padahal ada caleg lain yang mau mencampuri urusan PSI dengan sengaja ke DPP," kata Adnan kepada berbagai media. Selain itu, Ketua Halmahera Selatan PAN Mansur Abd Fatah mengatakan, posisi PAN sudah jelas dan mengeluarkan SK B.1 KWK dan menyerahkannya ke kediaman calon raja Halmahera Selatan Usman Sidik di Cibubur. penghentian SK PAN, dimana ketua DPP PAN Zulkifli Hasan bersikukuh tidak akan ada perubahan. Hal senada disampaikan Presiden DP PAN

Kabupaten Halmahera Selatan Mohtar Somaila pada 10 September 2022: "DPD PAN Kabupaten Halmahera Selatan masih berkoalisi karena hanya memiliki satu kursi di DPRD, sehingga DPP PAN memutuskan untuk mengusung paslon Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba, namun mereka juga masih dalam tim sukses. jumlah yang banyak.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa PAN Halmahera Selatan menyadari bahwa untuk mengajukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada Halmahera Selatan tahun 2020 diperlukan koalisi dengan parpol lain termasuk calon yang telah mengambil keputusan. DPP PAN Sekretaris DPD Golkar Rustam Ode Nuru juga dengan tegas menyatakan bahwa Surat Keputusan Golkar Nomor 184 bersifat final dan mengikat, tidak ada perubahan selama formalisasi dan Golkar siap bekerja sama dengan partai koalisi lainnya. Ketua DPD PDIP Bapulu Halmahera Selatan menegaskan hal yang sama, Jamra Hi Zakaria yang ditunjuk PDIP Usman - Bassam. "Tidak ada pembicaraan revolusi di DPP PDIP karena keputusannya sudah final," kata dia seperti dikutip media setempat. Ketua DPD PKS Halmahera Selatan Husni Salim, Usman - Bassam yang diusung PKS mengatakan, proses pemeriksaan dimulai dari DPD Halmahera Selatan, DPW Maluku Utara dan direktur Wilda Indonesia Timur dan diproses ke DPP, SK diberikan kepada Usman-Bassam dan sekretaris jenderal meneruskannya kepada presiden dan sekretaris. DPC kemudian DPC menyerahkannya kepada Usman-Bassam melalui Rakorda dan DPW menangannya saat itu di kantor Halmahera Selatan DPD PKS. Hal senada disampaikan Bupati DPD PKS Halmahera Selatan Husni Salim pada 16/09/2022: "DPD PKS Halmahera Selatan hanya mengajukan satu pasangan calon yakni Usman Sidik-Hasan Ali Bassam Kasuba untuk DPP PKS. Hal itu dilakukan karena Hasan Ali Bassam Kasuba adalah PKS tembakan." Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa PKS sejak awal berkomitmen untuk mendorong kadernya menjadi calon Wakil Gubernur Provinsi, sehingga ketika partai koalisi mengambil kader kedua, langsung mengajukan ke DPP. persetujuan dalam bentuk rekomendasi. Pemilik terbesar kedua setelah Golkar yakni PKB mengatakan melalui Ketua DPC PKB Muslim Hi Rakib bahwa PKB sudah jelas dan tidak akan berubah dan sejauh ini belum ada

informasi perubahan SK. "Intinya keputusan PKB bersifat final, mengikat dan tertutup bagi calon lain karena Usman Sidik anggota PKB dan pengurus DPP sudah dua periode," ujarnya. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Selatan Umar Hi. Soleman mengatakan pada 29 September 2022: "DPD Partai Golkar Halmahera Selatan memiliki 5 (lima) kursi di DPRD, sehingga pendaftaran calon Pangdam dan Wakil Pangdam terbuka. Kemudian nama-nama calon tersebut diajukan ke DPP melalui Partai Golkar Provinsi Maluku Utara DPD berdasarkan keputusan DPP memutuskan pasangan calon yang direkomendasikan Usman Sidik - Hasan Ali Bassam Kasuba Keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan partai Golkar makanya kami tetap tunduk dan patuh pada keputusan keputusan pasangan calon DPP Setelah mendapat rekomendasi dari DPD pusat kita, cabang-cabang bekerja keras untuk memenangkan pasangan calon Usman-Bassam. Bisa disimpulkan, Partai Golkar yang memiliki jumlah kursi terbanyak kedua di DPRD Halmahera Selatan ini akan tetap menerapkan mekanisme partai mulai dari membuka pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur hingga pengusulan dan negosiasi dengan DPP. untuk penelitian dan kemudian memutuskan salah satu pasangan calon. Keputusan DPP tersebut menjadi landasan DPD Partai Golkar dalam kiprah partai di Pilkada 2020, yang ditegaskan melalui wawancara dengan pengurus PKB Halmahera Selatan. Direktur DPC PKB Kabupaten Halmahera Selatan, Hallo Muslim. Rakib mengatakan pada 10 September 2022: "DPC PKB Halmahera Selatan hanya mengajukan satu nama calon gubernur yaitu Usman Sidik kepada DPP PKB. Selain itu, secara internal PKB membentuk kelompok setingkat yang terdiri dari camat dan pimpinan cabang." Maka, sejak awal PKB Halmahera Selatan menetapkan nama Usman Sidik sebagai calon raja Halmahera Selatan periode 2020-2024. beberapa alasan yaitu Usman Sidik adalah kader PKB dan Usman Sidik memiliki elektabilitas yang tinggi Gerakan koalisi untuk menunjukkan persatuan merupakan salah satu strategi ofensif untuk mendapatkan suara dari pemilih Hal ini dikonfirmasi oleh wawancara pasangan calon sekretaris koalisi Usman Sidiku - Hasan Ali Bassam Kasuba di kantornya pada 18/11/2022

"Awalnya tim koalisi dibentuk hanya tiga partai, yakni PKS, PKB dan PSI dengan jumlah 8 (delapan) kursi DPRD. Kerja partai koalisi ini sudah berjalan dengan membentuk tim sambil menunggu koalisi partai lain bergabung. Tim ini langsung bergerak melaksanakan program pencegahan Covid-19 dan penyerahan bantuan Sembako yang dirangkaikan dengan pembentukan tim kecamatan sebanyak 60 orang tim kecamatan dan tim desa 3.400 orang. Setelah ada tambahan 4 partai yaitu PAN, GOLKAR, PDIP dan Demokrat tapi tidak memengaruhi tim yang sudah dibentuk. Sedangkan PKPI dan Berkarya bergabung disaat menjelang pendaftaran,"

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat digambarkan bahwa tim koalisi partai pengurus Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba diawali dengan tiga partai koalisi yang langsung bekerja membentuk tim di tingkat kecamatan dan desa. Hasil dari kerja tim tersebut membuat elektabilitas calon terus meningkat hingga menarik perhatian dari partai lain untuk bergabung. Hasilnya, dalam perjalanan kerja-kerja tim dari tiga partai itu membuahkan hasil, karena bergabungnya 4 (empat) partai politik dan menjelang pendaftaran bertambahnya dua partai politik. Sebagaimana diakui oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Selatan, Benjamin Hi. Daud pada 28 September 2022:

"DPC PDI Perjuangan pada saat proses Pilkada, membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati, sehingga beberapa calon ikut mendaftar di DPC PDIP. Selanjutnya nama-nama calon Bupati dan wakil Bupati tersebut diusulkan ke DPP lalu DPP melakukan survey. Hasilnya, Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba dipilih oleh DPP PDIP berdasarkan hasil survey lalu dikeluarkanlah rekomendasi.

Strategi Kampanye Pilkada

Strategi koalisi parpol dalam pilkada Halmahera selanjutnya adalah terkait dengan strategi ofensif isu kampanye. Isu kampanye yang utama adalah tentu terkait dengan profil kandidat. Koalisi besar parpol dengan pasangan kandidat Usman-Bassam memiliki beberapa poin lebih dibandingkan pasangan Helmi-Laode. Meski bukan petahana namun Usman memiliki beberapa atribut yang menjadi bekal dalam kampanye untuk

mengajukan profil pemimpin daerah mendarat di Halmahera Selatan.

Usman Sidik merupakan calon Bupati terpilih pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan, Usman sidik berpasangan dengan wakilnya Hasan Ali Bassam Kasuba. Usman Sidik menjuluki pekerjaannya sebagai jurnalis pada siaran RCTI di Provinsi Maluku Utara pada tahun 1993-1996 itu sebagai kontributor Maluku Utara. Puluhan tahun, Suami dari Eka Dahliani Abusama ini berkecimpun di dunia jurnalis. Sejak tahun 2015-2019, Usman Sidik masuk ibukota negara tepatnya di Jakarta dan menduduki jabatan politik tingkat nasional. Ayah dari Ananta Rizky Raya Putra Sidik, Attaylah Putra Maheza Sidik menduduki posisi sebagai wakil sekretaris DPP PKB di pusat. Kemudian menjelang lima tahun kemudian tepatnya di 2019, Usman Sidik menempati posisi sebagai wakil bendahara DPP PKB Pusat.

Usman ditahun itu juga langsung turun dikampung halamnya tepatnya di Ori kecamatan kayoa selatan di kabupaten Halmahera Selatan melakukan sosialisasi mencalonkan diri sebagai calon Bupati di Pilkada Serentak 2020. Lulusan SMA Muhammadiyah Kota Ternate ini dengan niat untuk mengabdikan untuk masyarakatnya. Meskipun hanya satu tahun bergerak di Halmahera selatan dengan jumlah 249 desa dengan luas wilayah pulau pulau itu mampu dijangkau.

Usman Sidik memiliki sejumlah atribut yang memiliki “nilai jual” penting dalam kampanye. Hal itu tampak dari wawancara Bupati Halmahera Selatan terpilih Usman Sidik pada 28 September 2022. Dia menjelaskan bahwa “Untuk memperoleh dukungan partai politik yang banyak itu dilakukan dengan cara pendekatan. Bukan persoalan uang sebenarnya dalam memperoleh rekomendasi partai di pusat. Melainkan dengan adanya pimpinan partai memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendapatkan dukungan partai politik tersebut. Usman menjelaskan bahwa salah satu kelebihan dirinya adalah posisi di Partai Kebangkitan Bangsa. “Sebagai pengurus partai politik di pusat yakni Wakil Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, saya melakukan komunikasi dan pendekatan partai politik di pusat. Dengan memanfaatkan sebagai

pengurus DPP PKB, dan teman saya di partai lain di DPP sangatlah banyak dengan peluang strategis, saya menyakinkan mereka dan memperoleh dukungan sembilan partai politik tersebut.

Disini tampak bahwa jaringan nasional dari Usman menjadi pijakan kuat dalam mendapatkan dukungan pusat. Namun pada waktu yang sama, Usman juga memiliki rekam jejak di daerah Halmahera Selatan. Kombinasi pengalaman inilah yang menjadikan Usman mudah untuk dijadikan andalan dalam kampanye di Pilkada 2020. Dan seperti dijelaskan Usman, bekal di pusat dan pengalaman di daerah inilah yang menyebabkan dia mampu mencari pasangan yang dapat mendukung posisinya. Selain tim koalisi parpol yang besar, Usman juga membentuk tim bayangan untuk lapisan kerja dalam kemenangan tersebut. Keputusan itu diambil karena Usman Sidik adalah kader PKB dengan jabatan Wakil Bendahara DPP PKB, sehingga telah memiliki jaringan yang besar di pusat yang kemudian dijadikan sebagai kekuatan dan modal besar untuk mendapatkan dukungan partai sebagai syarat mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Selatan.

Sementara untuk pilihan orang yang mendampingi Usman di Pilkada Halmahera Selatan tahun 2020, merupakan pilihannya sendiri yaitu Hasan Ali Bassam kasuba yang merupakan kader PKS. Pasangan Usman-Hassan ini mengajukan tema kampanye menarik seperti dapat dilihat dari visi misi pasangan ini yakni: Bersatu mengembalikan senyum Halmahera Salatan yang lebih baik beradap dan penuh berkah. Selanjutnya pasangan ini juga mengajukan misi pencalonannya yakni: (1) Merevitalisasi bangunan kebersamaan dan kedamaian seluruh komponen masyarakat dalam bingkai semangat saruma; (2) Meningkatkan kualitas sistem pelayanan pemerintahan an yang bertumpuh pada prinsip reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menejmen berbasis nilai; (3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui revitalisasi system pelayanan jaminan social, masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; (4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui revitalisasi system pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, merata dan terjangkau; (5)

Merevitalisasi system kemandirian ekonomi berbasis budaya yang tertumpuh pada pembangunan potensi lokal unggulan yang bernilai tambah, berdaya saing dan ramah lingkungan; (6) Mengembangkan sistem pembangunan infrastruktur terpadu berbasis kepulauan yang berkualitas dan merata bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan (7) Membangun dan melestarikan kembali nilai-nilai luhur budaya dan adat seatorang, sebagai sumber inspirasi pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang beradab dan berkepribadian.

Sementara orang yang mendampingi Usman di Pilkada Halmahera Selatan tahun 2020, merupakan pilihannya sendiri yaitu Hasan Ali Bassam Kasuba yang merupakan kader PKS. Strategi kampanye pasangan calon Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba saat Pilkada serentak tahun 2020 dengan berbagai cara, baik itu dilakukan oleh calon maupun para tim pemenang. Strategi secara umum yang dilakukan berupa pemberian bantuan yang diinginkan masyarakat.

Selain itu juga, dalam materi kampanye menyampaikan sejumlah program misalnya, 1 (satu) kecamatan 1 (satu) kepala dinas, pelayanan kesehatan gratis berlanjut, pendidikan gratis era digital, 1 (satu) Puskesmas 2 (dua) dokter. Pembangunan infrastruktur, menjanjikan putra daerah dalam mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil, pelayanan perizinan gratis, pelayanan KTP di kantor kecamatan, peningkata SDM birokrasi, pemberian bantuan beasiswa serta mendatangkan APBN setiap tahun ke daerah Rp 9 miliar dan tidak menggunakan mobil dinas sehingga anggaran untuk mobil dinas dialihkan ke kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Usman-Bassam juga membalas isu-isu yang dimainkan oleh pasangan calon nomor urut 1 Helmi Umar Muksin – La Ode Arfan dan calon petahan yang gagal Bahrain Kasuba, dengan isu-isu korupsi, gagal dalam memimpin Halmahera Selatan dalam 1 (satu) periode dan gagal memperoleh dukungan partai pada periode kedua untuk mencalonkan diri kembali. Gufran Mahmud salah satu anggota fraksi Partai Golkar dalam orasi politiknya di hadapan masyarakat lima desa mengatakan Calon Bupati di Halmahera selatan hanya dua Bakal Pasangan calon, Yakni Hi Usman Sidik dan

Hasan Ali Bassam Kasuba. Kemudian Pasangan Calon Helmi Umar Mukchin dan La Ode Arfan.

Dalam kampanyenya calon Bupati Halsek Usman Sidik meakukan tindakan ofensif memojokan pesaingnya dalam pilkada. Usman dalam orasi politiknya menegaskan bahwa programnya kedepan lebih mengutamakan sistim pendidikan yang lebih baik yang berbasis digital atau belajar menggunakan sistim Daring agar lebih mencerdaskan generasi-generasi kita kedepan. Selain mencerdaskan generasi baru, Usman Sidik menegaskan lebih memprioritaskan memperdayakan program masyarakat pada khususnya pelayanan Kesehatan, Pertanian, Nelayan, maupun infrastruktur pembangunan. Menurutnya, Kabupaten Halmahera Selatan sangat tertinggal jauh di dibandingkan dengan Daerah Papua dan pulau morotai, sebab Papua dan Pulau sangat memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih baik.

Dalam kesempatan kampanye lainnya Usman seperti dikutip (kieraha.com, 2020) mengemukakan membangun Halmahera Selatan hakekatnya adalah perwujudan kedaulatan rakyat menuju suatu kondisi yang lebih baik. Pembangunan yang harus dipahami, kata dia, adalah sebagai implementasi kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan secara universal. Dalam kampanyenya Usman-Bassam mengusung Visi ‘Bersama Rakyat, Berjuang untuk Halmahera Selatan Sejahtera dan Berwibawa’. Makna yang terkandung di dalam Visi ini, kata Usman, yang pertama adalah Bersama Rakyat. “Itu karena rakyat sesungguhnya lebih mengerti tentang permasalahan yang dihadapi. Olehnya itu, jika kebersamaan dibangun bersama dengan rakyat untuk perwujudan perubahan, maka insya Allah perubahan akan terlaksana dengan lancar dan bijaksana,” katanya.

Yang kedua, makna Berjuang, kata Usman, itu karena bila perjuangan perubahan terwujud, maka rakyatlah yang berkata kamilah yang mengerjakannya dan bukan sang pemimpin yang melakukannya. “Sementara, Untuk Halsek Sejahtera dimaknai sebagai kebersamaan dalam perjuangan untuk menuju pada arah perjuangan lebih baik dan semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat di negeri tercinta Halmahera Selatan,” sambungnya. “Yang terakhir adalah makna Berwibawa, yang artinya memiliki

keunggulan akan kualitas sumber daya manusia yang handal dalam segala aspek,” katanya.

Sementara, Misi yang dicanangkan Haji Usman, antar lain mendorong kemandirian rakyat melalui pengoptimalan Sumber Daya Alam yang dimiliki, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terampil di berbagai bidang, mewujudkan pelayanan pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Selain itu ada beberapa program yang akan diprioritaskan dalam 5 tahun kedepan, yaitu penguatan infrastruktur ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi berbasis komoditi unggulan dan perikanan,” tambahnya.

Pasangan Calon Bupati Usman Sidik yang juga mantan wartawan ini menggunakan media sebagai wadah mempromosi diri, mulai dari profil kehidupan masa lalu hingga pada kesuksesannya saat mencalon diri sebagai calon Bupati Halmahera Selatan periode 2020-2024. Selain visi misi yang lengkap, calon Bupati Usman yang memiliki pengalaman di pusat, koalisi besar ini juga dalam kampanyenya mengunggulkan calon wakil Bupati Bassam. Ali Bassam Kasuba sendiri sudah banyak dikenal publik karena merupakan anak dari Bupati Halmahera Dua Periode yakni Muhammad Kasuba. Dengan bekal profil wakil Bupati yang memiliki rekam jejak keluarganya pemimpin Halmahera Selatan inilah dijadikan isu dalam kampanye koalisi besar ini (suaraindonesianews.com, 18 September 2022).

Dalam strategi ofensif ini isu yang diangkat dalam kampanye koalisi besar menyangkut pencapaian minim dari pasangan petahana. Informasi yang diserap tim koalisi besar muncul ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Helmi Umar Mucksin-Laode Arfan. Ketidakpuasan masyarakat inilah yang dijadikan bahan kampanye untuk merendahkan petahanan dan sekaligus meningkatkan pasangan Usman-Bassam. Selain itu ketidakpuasan masyarakat, koalisi besar juga mengangkat isu kampanye terkait dugaan korupsi terhadap petahanan yang muncul menjelang pencoblosan tanggal 9 Desember. Strategi ofensif ini juga dikerahkan dengan melakukan gerakan datang ke TPS pada 9 Desember 2020. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Usman-Bassam,

Muhammad Yunus Nazar mengatakan, seluruh kader partai koalisi dan relawan Usman-Bassam harus memastikan setiap dukungan warga Halmahera Selatan berujung mencoblos nomor urut 2 di TPS.

Gerakan mencoblos nomor urut 2 Usman-Bassam, kata Muhammad Yunus, tidak hanya dilakukan saat kampanye dan pertemuan tatap muka warga. Namun juga diminta dilakukan dengan mendatangi rumah warga. Gerakan ini juga bisa dengan memasang alat peraga kampanye seperti membagikan stiker. Dengan koalisi yang dibangun di daerah dimana tergabung partai yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan menunjukkan adanya strategi koalisi yang pragmatis yang fokus hanya kepentingan partai itu sendiri tapi di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Proses koalisi partai politik Pilkada Serentak Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan oleh calon Bupati Usman Sidik dengan memanfaatkan jaringannya di tingkat nasional. (2) Usman Sidik membaca peluang kemenangan dengan memborong lebih banyak dukungan partai politik di pusat. (3) Petahana Bahrain Kasuba gagal memperoleh tambahan dukungan partai sehingga gagal mendaftar dirinya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat tidak cukup memperoleh partai pengusung. Koalisi besar partai politik terbentuk diawali gabungan PKB, PSI dan PKS dengan jumlah 8 kursi parlemen. Kemudian bertambah, PAN, demokrat, PDIP, Berkarya dan terakhir PKPI yang bergabung pada detik detik pendaftaran paslon Bupati dan wakil Bupati di kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan. (4) Dalam koalisi besar sembilan partai politik membentuk tim kampanye dan tim penghubung. (5) Sebulan sebelum pencoblosan hari H, tim kampanye dan penghubung sudah mengakumulasi kemenangan dilihat dari jumlah Sembilan mesin partai politik. Maka Usman Sidik-Hasan Ali Bassam Kasuba mendukung suara diatas 60.000. Setelah hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten di lakukan KPU Halmahera Selatan paslon anonim Usman-Bassam 62.348 suara dengan rinalnya paslon nomor 1 Helmi-Laode hanya memperoleh

51.097 suara dengan selisih kemenangan 11.251 suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Gunawan, Arry Bainus dan Caroline Paskarina.(2020). Strategi Koalisi Partai Politik Lokal Dan Partai Politik Nasional Dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah: Studi Kasus Kemenangan Pasangan Jamin Idham Dan Chalidin Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017. *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, No. 1 (June 29, 2020): 51–68.
- Khodijah, Siti dan Valina Singka Subekti.(2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. *Nakhoda: Jurnal Pemerintahan*. Vol. 19. No.2.
- Laver, Michael (1994) 'Party Policy and Cabinet Portfolios in Ireland 1992: Results From an Expert Survey', *Irish Political Studies* 9: 157-164.
- Noor, Firman Noor.(2018). Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018). *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 15 No. 2 Desember 2018, hlm. 179.
- Mohammad Fazrulzaman Azmi, Rania Solihah, Ari Ganjar Herdiansah (2017) Pembentukan Koalisi Partai Politik Pendukung Ajay-Ngatiyama Pada Pilkada Kota Cimahi *Jurnal Wacana Politik*.
- Sunarso, S. (2018). *Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya)*. Humanika.
- Sopian Ependi Manalu, Nurul Nurhandjati (2021) *Dinamika Koalisi Partai dalam Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara 2018*. *Jurnal Publicuho*
- Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 177-187 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
- Tony Yuri Rahmanto (2018) *Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten*.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 Di Indonesia. *Crepido*. 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>.
- Prawitasari, I., & Erowati, D. (2021). Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1176–1183. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.517>
- Wahyudi, F., & Hanifannur, M. (2021). Pelaksanaan Pilkada Serentak di masa Pandemi Covid-19 Perspektif Qawaid Fiqhiyyah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.6844>.
- Husen, M., & Suleman, S. (2020). Etnisitas dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ejournal KAWASA, 10(Nomor 3),
51-61.

Gafur, I. A., Rumkel, N., & Hakim, A. A. (2020). Efektifitas Penegakan Pelanggaran Administrasi Pada Pemiluhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Terhadap Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Halmahera Selatan). *Khairun Law Journal*, 3(2), 93-105.

Suleman, S. (2020). Fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pendidikan Gratis di Kabupaten Halmahera Selatan. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 53-60.

Solihin, E. B., Rettob, K., & Effendi, D. (2022). The Incumbent's Curse, Party Institutionalization, and Competitive Factionalism in the Candidacy for South Halmahera Election in 2020. *Jurnal Politik*, 8(1), 2.

Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311.

Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1-20.

